

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS

Tgl/Bln/Thn : 12 Februari 2009

Subyek :

Hari : Kamis

Kata Kunci :

Halaman : 22

Lapindo Tak Penuhi Kesepakatan

PT Minarak Lapindo Jaya tidak memenuhi kesepakatan yang dibuat pada 3 Desember 2008 soal cicilan pembayaran ganti rugi Rp 30 juta per bulan. Sampai sekarang kesepakatan itu belum terealisasi.

Terkait hal itu, sekitar 2.000 warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) I yang tergabung dalam Tim 16 mendatangi kantor PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) di Gedung Srijaya di Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya, Rabu (11/2). Mereka mempertanyakan kesanggupan Lapindo menepati janji.

"Kami khawatir nasib kami? Sudah dua bulan tidak ada kejelasan setelah ada kesepakatan antara Lapindo, pemerintah, dan warga," ungkap Ketua Tim 16 Koes Sulassono kepada Vice President PT MLJ Andi Darussalam Tabussala.

Menurut Koes, korban lumpur Lapindo telah bersabar. Mereka menerima pembayaran ganti rugi 20 persen dan dua tahun kemudian baru dilunasi 80 persen. Pelunasan itu pun diminta Lapindo untuk dicicil Rp 30 juta per bulan. Namun, sampai sekarang tak ditepati.

Karena itu, Koes minta kepastian, apakah Lapindo akan menepati kesepakatan 3 Desember 2008. Jika tidak, para korban akan demo lagi ke Jakarta.

Andi Darussalam menyatakan, kesepakatan 3 Desember 2008 tetap berjalan. Namun, dia mengakui kesepakatan tersebut belum bisa seutuhnya terealisasi. Persoalannya, Lapindo terkena dampak krisis keuangan global. "Saat ini kami tidak sanggup mengangsur Rp 30 juta per bulan," ujarnya.

Sampai 11 Februari 2009, MLJ membayar sisa ganti rugi 80 persen sebanyak 5.659 berkas dengan nilai Rp 876,6 miliar. Padahal, seluruhnya ada 12.886 berkas senilai Rp 3,25 triliun.

Di Sidoarjo, Dewan Pengarah Panitia Khusus Lumpur Sidoarjo DPRD Sidoarjo Jalaluddin Alham berharap MLJ bersikap tegas. Berulang kali MLJ menyatakan berkomitmen menuntaskan pembayaran, tetapi realisasi di lapangan tersendat.

Rekomendasi DPRD Sidoarjo agar pemerintah menalangi dulu pembayaran ganti rugi yang macet, menurut Jalaluddin, ditolak MLJ. MLJ menyatakan akan menuntaskan pembayaran ganti rugi, padahal kenyataannya pembayaran tersendat.

Ia berharap dana perbaikan jalan tersebut turun seiring dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Atau, lanjut Syamsul, dana dialokasikan pada tahun anggaran 2010.

"Sebenarnya, kondisi ini masuk ke tanggap darurat sehingga harus cepat diperbaiki," kata Syamsul lagi, seraya menambahkan, jalan tersebut harus dilindungi tanggul pantai sebab laut makin menggerus daratan. Tahun lalu, jarak laut dengan jalan mencapai 8 meter. Kinitaktersisa lagi daratan.

Menurut Direktur Rawa dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Departemen PU Djajamurni Warga Dalam, mangrove harus ditanam di kawasan pesisir itu untuk melindungi infrastruktur. "Bila mengandalkan pendanaan, sangat berat melindungi infrastruktur di pantai-pantai. Sebab, kami hanya mendapat Rp 400 miliar untuk tahun ini," katanya.

Anggaran sebesar itu, menurut Djajamurni, hanya bisa membangun 40 kilometer tanggul laut. Padahal, garis pantai Indonesia 81.000 kilometer.

Di Kalimantan Barat, abrasi juga mengancam jalan nasional yang menghubungkan Mempawah (ibu kota Kabupaten Pontianak) dengan Kota Singkawang. Namun, tanggul laut telah dibangun Departemen PU dengan cara membuat kubus beton berukuran 40 x 40 sentimeter. Mangrove pun telah ditanam pada ruang di antara tanggul laut dan jalan nasional.

"Kami mencoba menghemat anggaran di tanggul laut yang melindungi jalan nasional itu. Caranya, memasang terucuk, kemudian menaruh anyaman bambu di dasar laut, kemudian meletakkan kumpulan batu kubus di atasnya," tambah Djajamurni.

Biasanya, lanjutnya, tanggul laut dibuat dari tembok beton masif. Inovasi itu dikerjakan agar pantai yang ditangani lebih panjang.